
Polemik Tapera : Paradoks Komunikasi Politik Pemerintah Dari Perspektif Teori Komunikasi

Endy Sagita

Fakultas Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana, Universitas Paramadina, Jakarta

E-mail: endy.sagita31@gmail.com

Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 14 Oktober 2024

Accepted: 16 Oktober 2024

Keywords: Tapera, Teori Komunikasi, Paradoks Komunikasi.

Abstract: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis komunikasi politik pemerintah dalam diskursus Tapera dan dampaknya terhadap persepsi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis berita media, dan wawancara. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam komunikasi pemerintah dan respons publik terhadap program Tapera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berusaha untuk menyampaikan manfaat Tapera, banyak informasi penting yang tidak disampaikan secara jelas, menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi politik pemerintah. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

PENDAHULUAN

Tujuan dari Tabungan Perumahan Rakyat, juga dikenal sebagai Tapera, adalah untuk mengumpulkan dan menyediakan dana pembiayaan perumahan murah dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta (BP Tapera (2022)). Tapera pada awalnya diluncurkan pada era Wakil Presiden Boediono, Peserta Tapera adalah seluruh masyarakat berpenghasilan, baik pekerja maupun pekerja mandiri, dengan gaji tetap atau tidak tetap.

Perjalanan panjang Tapera dari mulai RUU pada tahun 2013 telah menimbulkan kontroversi antara Pemerintah dengan DPR. Ketika itu, Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menyatakan bahwa pihaknya menghadapi masalah saat menyusun rencana aturan ini. Faktor-faktor seperti jenis partisipasi dalam Tapera, besaran iuran dan pemanfaatan dana Tapera, kontribusi pemberi kerja, badan pengelola Tapera, sistem yang digunakan oleh badan pengelola untuk mengelola dana Tapera, investigasi, dan sanksi adalah semua masalah yang terkait.

Ketika akhirnya diundangkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2016, Pemerintah menyiapkan turunan dari UU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Tapera, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. PP Nomor 21 Tahun 2024 inilah yang kemudian menuai kecaman dari banyak kalangan karena adanya aturan pemotongan penghasilan karyawan sebesar 3% untuk iuran Tapera mulai 2027, dan potongan ini dinilai memberatkan pekerja.

Tujuan dari tulisan ini menganalisis komunikasi politik Pemerintah dan mengidentifikasi persepsi publik menggunakan beberapa perspektif teori komunikasi untuk menjabarkan paradoks komunikasi politik Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis konten. Analisis konten adalah "Teknik Penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan valid dari teks (atau hal lain yang bermakna) dengan konteks penggunaannya", kata Krippendorff (2004). Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis berita media. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam komunikasi pemerintah dan respons publik terhadap program Tapera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi dan Teori Komunikasi

Individu akan selalu menjadi bagian dari hidup individu yang lain. Mengetahui mengapa individu mengatakan dan melakukan apa yang mereka lakukan akan memungkinkan seseorang untuk secara proaktif mengambil kendali dan menciptakan kesan abadi yang mereka inginkan melalui cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Proses relasional dalam menciptakan dan menginterpretasikan pesan yang menimbulkan respons inilah yang disebut sebagai komunikasi (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019a). Karena komunikasi merupakan bagian integral (bahkan merupakan bagian mendasar dari penamaan bidang komunikasi strategis) dan karena memahami tujuan komunikasi merupakan hal yang esensial, maka ilmu komunikasi dapat dilihat sebagai pilar yang menjadi dasar dari bidang ini.

Sedangkan teori adalah prinsip-prinsip dan gagasan umum tentang suatu subjek (Kawulich & De Benetti, 2014). Akibatnya, terdapat berbagai kesepakatan dan ketidaksepakatan tentang apa yang merupakan teori komunikasi yang memadai, yang menjelaskan bagaimana komunikasi "bekerja". Teori selalu melibatkan konjektur, berisi seperangkat dugaan yang sistematis dan terinformasi tentang cara kerja sesuatu (Griffin et al., 2019a). Dari pembahasan tersebut, Bormann (dalam (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019b) mendefinisikan teori komunikasi sebagai berikut:

Theory as "an umbrella term for all careful, - systematic, and self-conscious discussion and analysis of communication - phenomena"

Artinya, teori merupakan sebuah istilah umum untuk semua diskusi dan analisis yang cermat, sistematis, dan sadar diri terhadap fenomena komunikasi.

2. Agenda Setting Theory

Media massa memiliki pengaruh besar dalam menampilkan isu sebagai agenda publik, dan *Agenda Setting Theory* adalah teori yang tepat dalam membahas tentang hal ini. Agenda publik adalah fokus utama atau isu utama yang menjadi perhatian anggota masyarakat atau publik. Istilah teori *agenda setting* pertama kali digunakan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini menguraikan hubungan antara penekanan yang diberikan oleh media massa terhadap

suatu isu dengan reaksi atau atribut yang diberikan oleh khalayak atau masyarakat terhadap isu tersebut (Littlejohn & Foss, 2011).

Teori ini masih memiliki relevansi dalam praktik jurnalisme di era digital. *Agenda Setting Theory* menggambarkan kapasitas media berita digital untuk mempengaruhi dan mengarahkan wacana publik. Artinya, jika sebuah berita sering diliput dan ditonjolkan, khalayak akan menganggap isu tersebut lebih penting. Kusugh & Sabo Kente (2022; Mohd. Zain, 2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa media dapat mempengaruhi opini khalayak media atau masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui *agenda setting* media terhadap suatu isu atau agenda tertentu. Semakin cepat perangkat yang digunakan dalam penyampaian informasi, maka semakin besar pula pengaruh media tersebut.

Dalam melayani pengaruh media terhadap masyarakat atau khalayak media, masyarakat atau publik masyarakat atau khalayak harus diberikan pengetahuan yang benar agar mereka dapat mengevaluasi fakta secara keseluruhan dan mereka dapat membentuk opini dengan benar terhadap isu yang ada. Hal ini penting untuk menghindari masyarakat atau khalayak media menjadi tergantung secara totalitas terhadap informasi yang disampaikan oleh media. Kusugh & Kente (2022) menemukan fakta dalam penelitiannya bahwa melalui berita, komentar, dokumenter, wawancara, visual, dan konten lainnya, audiens terpapar dengan pesan-pesan yang berorientasi politik dan juga memberikan kebebasan untuk membuat pilihan.

Dari perspektif teori ini, ekspektasi yang diharapkan dari Pemerintah adalah kemampuan mempengaruhi publik dan membentuk opini positif dalam diskursus Tapera. Namun yang muncul justru paradoks komunikasi politik, ketika usaha Pemerintah menetapkan agenda dengan memfokuskan perhatian publik pada manfaat Tapera ternyata gagal dalam menyampaikan informasi penting mengenai manfaat dan tantangan program ini kepada media untuk membentuk opini positif masyarakat. Implikasinya justru menjadi respons negatif berupa ketidakpercayaan publik, karena mereka merasa tidak menerima gambaran lengkap yang objektif dari program Tapera.

Ketidakkemampuan *men-drive* opini melalui media berimplikasi membuat Tapera menjadi kontroversi dan menimbulkan polemik berkepanjangan karena publik justru lebih melihat Tapera memberatkan karena memotong penghasilan yang dinilai memberatkan di tengah situasi ekonomi belakangan ini.

3. *Communicative Constitution of Organizations*

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Robert McPhee, yang berfokus pada bagaimana organisasi terbentuk dan dipertahankan melalui komunikasi (Littlejohn & Foss, (2011); Griffin, et.al., (2019a)). McPhee beranggapan bahwa organisasi tidak hanya dipandang sebagai entitas statis melainkan sebagai proses yang secara terus-menerus dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi, dan komunikasi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menyampaikan informasi tetapi merupakan elemen fundamental yang secara aktif membentuk dan mempertahankan organisasi. Artinya, perilaku komunikasi mengurangi ambiguitas dan ketidakjelasan.

Hinck & Conrad (2018) mengekspresikan bahwa politik organisasi dapat dilihat sebagai proses di mana kekuasaan dijalankan secara terbuka di dalam organisasi, baik di tingkat permukaan maupun melalui manifestasi struktural dalam tiga komponen – disensus, strategi, dan jaringan. Proses-proses tersebut beroperasi baik di dalam atau di luar organisasi yang membentuk lingkungan dan sistem makna di mana organisasi tersebut menjalankan misinya. Dalam konteks negara, komunikasi politik seharusnya dijalankan secara terbuka untuk membentuk lingkungan dan sistem makna di negara mana pemerintahan berjalan, untuk membangun citra terhadap pemerintah dan politisi.

Dari perspektif teori ini, muncul paradoks berikutnya dalam komunikasi politik, dimana komunikasi oleh Pemerintah dalam diskursus Tapera terkesan tertutup dan memiliki tendensi menyembunyikan informasi. Ironisnya, publik melihat bahwa Pemerintah memiliki konflik internalnya sendiri dalam Tapera. Konflik internal yang pada akhirnya membuat Pemerintah tidak mampu memanfaatkan media, baik media *mainstream* maupun digital dalam penyampaian pengetahuan mendasar tentang Tapera. Publik dipampangkan kondisi Pemerintah yang mengalami kesulitan dalam koordinasi dan kolaborasi antar institusi di dalam tubuhnya, ketika apa yang disampaikan oleh Presiden berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri. Perilaku komunikasi yang seharusnya mengurangi ambiguitas dan ketidakjelasan tidak terlihat dalam permasalahan Tapera, sehingga wajar jika program Tapera memiliki kepercayaan publik yang rendah.

Implikasi dari tidak adanya unsur transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, membuat Tapera menjadi sebuah polemik yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan konflik antara Pemerintah dengan masyarakat.

4. *Symbolic Convergence Theory*

Symbolic Convergence Theory berfokus pada kekuatan narasi dan simbolisme bersama, yang dari keduanya dibangun sebuah kesadaran kolektif dan menumbuhkan realitas sosial yang "*unified*" bagi anggota kelompok dengan memuaskan kebutuhan manusia akan pemahaman dan rasa memiliki bersama. Hal demikian berarti menghadirkan sebuah "*bonding*" emosional ketika narasi simbolik dibuat dan disebar dengan cara merangsang partisipasi emosi, empati, dan identifikasi dengan tujuan kelompok.

Dicetuskan pertama kali oleh Ernest Bormann pada tahun 1990, teori ini menunjukkan bahwa fungsi pengaturan agenda melalui media ketika elit politik dan partai politik mencoba mempromosikan isu dan prioritas melalui narasi simbolik yang disebarluaskan (melalui media), kemudian publik menyatukan makna simbolik tersebut. Teori ini membantu proses pembentukan identitas politik yang sangat terkait dengan realitas kelompok yang dibayangkan, kemudian menimbulkan identifikasi partisan dari konvergensi pada "*vision*" yang bernuansa Kawan vs Lawan.

Dari perspektif teori ini, publik kembali disodorkan paradoks berupa ketidakmampuan Pemerintah membangun narasi atau visi bersama mengenai Tapera sebagai solusi bagi masalah perumahan. Narasi tersebut tidak sesuai dengan pengalaman nyata masyarakat atau tidak melibatkan partisipasi aktif mereka sehingga narasi ini tidak efektif.

Implikasinya justru menjadi sebuah *backfire* karena masyarakat merasa tidak dilibatkan atau diwakili dalam narasi Tapera yang tiba-tiba menjadi "*mandatory*", dan pada akhirnya mengakibatkan kurangnya dukungan dan timbulnya respons antipati terhadap Pemerintah dan Tapera.

5. *Uncertainty Reduction Theory*

Uncertainty Reduction Theory utamanya berkaitan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas tentang perilaku diri sendiri dan orang lain dalam interaksi, terutama dalam pertemuan awal. Dicusulkan oleh Charles Berger, teori ini memfokuskan pada prediktabilitas, sebagai kebalikan dari ketidakpastian Griffin et al. (2019a). Dengan pendekatan teori ini, orang memiliki kemampuan untuk memprediksi alternatif atau alternatif mana yang mungkin terjadi berikutnya menurun dan ketidakpastian meningkat.

Knobloch dalam Grace & Tham (2021) mengungkapkan bahwa URT terdiri dari tiga tahap perkembangan, yaitu tahap *entry*, *personal*, dan *exit*, yang menjelaskan bagaimana orang asing

berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang satu sama lain selama pertemuan awal. Sebagai pengembangan dari tahapan tersebut, keduanya memberikan alternatif dalam penanganan krisis, yaitu (1) meningkatkan frekuensi komunikasi untuk menjelaskan peristiwa yang memicu krisis, (2) menciptakan peluang bagi pengguna untuk mencari informasi dan komunikasi interaktif, dan (3) merespons ketidakpastian pada saat terjadinya krisis dengan menekankan protokol dan pesan yang sudah dikenal. Sementara Fatwasuci & Irwansyah (2021) menemukan bahwa URT masih memiliki relevansi dan dapat dikaitkan dengan kasus-kasus kontemporer yang diterapkan dalam situasi berbasis jaringan atau *online*.

Dari perspektif teori ini, paradoks lain mengemuka ketika Pemerintah memberikan informasi tentang Tapera untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh publik, namun justru informasi tersebut tidak cukup jelas dan malah bertentangan, sehingga meningkatkan kebingungan dan ketidakpastian. Pemerintah tidak mampu membangun narasi yang membentuk opini positif pada publik, dan bahkan tidak memiliki prediktabilitas yang baik bahwa narasi tersebut berlawanan dengan narasi publik. Demikian juga dengan saluran informasi bagi publik dalam mencari kejelasan, Pemerintah menyediakan saluran komunikasi yang normatif. Ditambah lagi Pemerintah tidak benar-benar serius menyiapkan protokol untuk merespons kegalauan publik.

Implikasi dari ketidakmampuan komunikasi yang terjadi pada Tapera menjadi kebalikan dari tujuan teori ini untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga kenyataan yang dihadapi saat ini adalah peningkatan ketidakpastian yang kemudian memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Ketidakpastian dan kebingungan inilah pencetus respons negatif dan antipati terhadap Pemerintah dan Tapera.

5. *Social Penetration Theory*

Social Penetration Theory Altman & Taylor pada tahun 1973 berfokus pada proses pengungkapan diri secara bertahap dan pendalaman hubungan dari waktu ke waktu, menekankan pada keluasan dan kedalaman informasi yang dibagikan di antara individu; dan bertujuan untuk meningkatkan keintiman dan kedekatan hubungan. Abdurrahman, Putri, & Irwansyah (2021) menganalogikan orang dalam teori ini sebagai beberapa lapisan dari sebuah bawang, yang memberi tahu orang lain pada awal hubungan, kemudian memberi tahu mereka lebih banyak tentang diri mereka sendiri saat hubungan semakin dekat dan membangun kepercayaan Terdapat empat tahap perkembangan relasional yang berkorelasi dengan peningkatan kedalaman dan keluasan interaksi, yaitu (1) orientasi, (2) pertukaran afektif eksploratif, (3) pertukaran afektif dan (4) pertukaran stabil Pennington (2021) . Di era digital belakangan ini, penelitian di atas mengungkapkan bahwa pengungkapan diri yang dimediasi oleh teknologi digital dapat membatasi jumlah data pribadi dan umum yang dibagikan oleh orang. Keterbatasan ini terletak pada kemampuan orang umum untuk membaca pesan nonverbal.

Dari perspektif teori ini, paradoks komunikasi politik yang timbul adalah ketika Pemerintah berusaha membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih terbuka dengan masyarakat, namun bertolak belakang dengan kesan yang ditampilkan. Pemerintah terkesan menutupi banyak bagian dari informasi yang seharusnya diterima publik.

Implikasinya, publik merasa bahwa hubungan dengan Pemerintah adalah hubungan yang dangkal, manipulatif dan tidak bermakna. Konklusi publik pada akhirnya menggerus tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap Pemerintah, politisi dan program Tapera itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Pemerintah perlu lebih mendalami teori-teori komunikasi, utamanya teori komunikasi yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik. Era

digital membuat literasi masyarakat meningkat dalam menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintahnya.

Belajar dari polemik Tapera, PR Pemerintah adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam program yang berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat.

Penyelesaian terhadap tantangan komunikasi tersebut diharapkan akan membangun kepercayaan dan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, A. G., Putri, C. N. D., & Irwansyah, I. (2021). Implementasi Teori Penetrasi Sosial pada Pengguna Aplikasi Tinder. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(2), 24–38. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.1661>
- BP Tapera. (2022). Tujuan Tapera. Retrieved October 4, 2024, from <https://www.tapera.go.id/dasar-hukum/>
- Fatwasuci, K., & Irwansyah, I. (2021). Perkembangan Penerapan Uncertainty Reduction Theory dalam Interaksi Tatap Muka dan Interaksi dalam Jaringan (Online). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 883. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2191>
- Grace, R., & Tham, J. C. K. (2021). Adapting Uncertainty Reduction Theory for Crisis Communication: Guidelines for Technical Communicators. *Journal of Business and Technical Communication*, 35(1), 110–117. <https://doi.org/10.1177/1050651920959188>
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019a). *A First Look at Communication Theory* (Tenth Edition). New York: McGraw-Hill.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019b). *A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY TENTH EDITION*. New York.
- Hinck, R., & Conrad, C. (2018). Organizational Politics. In *The International Encyclopedia of Strategic Communication* (pp. 1–12). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0125>
- Kawulich, B., & De Benetti, T. (2014). *The Role of Theory in Research Theory's role in a Research*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/201834276>
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content analysis : an introduction to its methodology*. Sage.
- Kusugh, T., & Sabo Kente, J. (2022). *Exploratory Study of Broadcast Media Discourse on Political Party Zoning System and Voting Patterns among Electorate in Select Nigerian Cities*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/372308170>
- Littlejohn, S. W. ., & Foss, K. A. . (2011). *Theories of human communication*. Waveland Press.
- Mohd. Zain, N. R. (2014). *Agenda Setting Theory*.
- Pennington, N. (2021). Extending Social Penetration Theory to Facebook. In *The Journal of Social Media in Society Fall 2021* (Vol. 10)